

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anggraini, Tri A.M. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per se Illegal atau Rule of Reason*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet-1, 2003.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Cet-4, Oktober 2004.

Hanitijo, Ronny Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Komaruddin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Penerbit: Angkasa Bandung, 1986)

Khemani, Syham R., et.all. *A Framework for The Design and Complementation and Policy* (Washington, D.C and Paris: The World Bank and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 1999

Kusunoki, Shigeki, "Shaping an Anti Monopoly Law Sanction Regime Against Cartels or Bid Rigging Collusion: a perspective on Japan's Choice", University of Detroit Mercy Law Review, 2002.p.401.

Lohse, dan Sacker. *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Busniess Competition*, (GTZ-Katalish Publishing 2000).

Natasya, Ningrum Sitrait. *Hukum Persaingan di Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Penerbit: Pustaka Pelajar, Cet-2, April 2007)

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986)

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cet-3, 1986)

Sumardjono, Maria S.W. *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bahan Kuliah Magister Hukum Bisnis), 2005

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004.

Wibowo, Destivano dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Cet-1, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sinar Grafika, Cet-2, 2004.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 telah mengalami empat kali perubahan dengan melalui Keputusan Presiden No.61 Tahun 2004, kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden RI No.32 Tahun 2005, kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden No.70 Tahun 2005, dan perubahan terakhir menjadi Peraturan Presiden No.6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

## **C. Makalah, Jurnal, dan Seminar**

Anggraini, Tri A.M. *Persekongkolan Penawaran Tender dalam Perspektif Hukum Persaingan*, Makalah.

-----, *Penegakan Hukum dan Sanksi Hukum Dalam Penawaran Tender*, Makalah, hlm.10.

46-3 Kokeeishu (High Court Criminal Report) 322 (Tokyo High Court, decided on Dec.14, 1993).

Kumar Mehra, Salil, "*Politics and Antitrust in Japan*", *Virginia Journal of International Law*, 2002.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Persekongkolan dalam Tender dan Contoh Kasus*, Makalah, hlm.10

Okatani, Naoki. "Regulation on Bid Rigging in Japan, The United States and Europe". *Pacific Laws&Policy Jurnal*, March 1995

Takeshima, Kazuhiko. *The Lessons from Experience of Antimonopoly Act in Japan and The Future of Competition Laws and Politic in East Asia*, disajikan dalam The Second East Asian Conference on Competition Law and Policies, Bogor, 3-4 Mei 2005

Yusuf, Mochammad Adidana, dalam forum Seminar mengenai *Persekongkolan Sebagai Suatu Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Jakarta 16 Januari Tahun 2008).

#### D. Kamus

Black, Henry Campbell. *Black's Dictionary*, Revised Fourth Edition, West Publishing Co, St. Paull, Minn., 1968.

Ilmiah, Kamus Populer. *Referensi Ilmiah, Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Sains*, Gramedia Press, Cet-1 Surabaya 2006.

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

#### E. Harian

Suara Karya. "*Persekongkolan Pemerintah Kian Parah*", 17 Oktober 2001

#### F. Internet

<http://sptpkkoja.wordpress.com/2007/12/04/public-hearing-pencegahan-persekongkolan-tender-melalui-pengaturan-kebijakan-pengadaan-barangjasa/>

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org).

[www.Hukum-online.com](http://www.Hukum-online.com)

[www.Pemantauperadilan.com](http://www.Pemantauperadilan.com)